**Ketahanan Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum di Kabupaten Pandeglang**

**(Food Security Before and During The Covid-19 Pandemic In Pandeglang District)**

**ABSTRAK**

World Food Programme menyebutkan pada tahun 2020 terdapat 768 juta jiwa yang mengalami kelaparan kronis akibat meningkatnya kemiskinan dunia dalam masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi penyebaran Covid-19, sektor pertanian menjadi kebutuhan prioritas karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional terdampak karena meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021, Kabupaten Pandeglang mengalami keterpurukan, yaitu 2,64%; hal ini akan memengaruhi ketahanan pangan khususnya, dalam aspek keterjangkauan. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan cepat diperlukan untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan guna memberikan arah dan rekomendasi penyusunan program dan kebijakan khususnya saat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan ketahanan pangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfataan pangan. Analisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan uji t sampel berpasangan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dari laporan *Food Security and Vulnerability Atlas* Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang sebelum dan selama pandemi Covid-19, yaitu penurunan nilai komposit ketahanan pangan terutama pada aspek keterjangkauan. Peningkatan rata-rata terbesar terjadi pada indikator nisbah jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah pada tahun 2020.

Kata kunci: ketahanan pangan, Covid-19

*ABSTRACT*

*The World Food Programme said that in 2020 there were 768 million people who experienced chronic hunger due to the increase in world poverty during the Covid-19 pandemic. In facing the spread of Covid-19, the agricultural sector is a priority because it is directly related to national food security. As a national food barn, West Java is affected by the increase in poor people. Pada in 2021, Pandeglang* *Regency experienced extreme poverty, which is 2.64%; this will affect food security in particular, in terms of affordability. Therefore, the availability of accurate and fast food security information is needed to prevent and handle food insecurity in order to provide direction and recommendations for preparing programs and policies, especially during the Covid-19 pandemic. This study was based on analyzing differences in food security before and during the Covid-19 Pandemic in Pandeglang* *Regency regarding food availability, affordability, and utilization. The analysis used a descriptive quantitative method with a paired sample t-test. The data source is secondary data from the Food Security and Vulnerability Atlas report of Pandeglang* *Regency. The analysis shows a noticeable difference between the food security of Pandeglang Regency before and during the Covid-19 pandemic, namely the decrease in the composite value of food security, especially in affordability. The most significant average increase occurred in the lowest welfare ratio indicator in 2020.*

*Keywords: food security, Covid-19*

**PENDAHULUAN**

*World Food Programme* (WFP 2021) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 bertepatan saat terjadinya Pandemi Covid-19, terdapat 768 juta jiwa yang mengalami kelaparan kronis. Angka kelaparan ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 650 juta jiwa. FAO (*Food Agriculture Organization*) juga melaporkan bahwa pandemi Covid-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia yang berikaitan erat dengan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan dari cukupnya ketersediaan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kelaparan kronis yang disebutkan tadi terjadi karena meningkatnya kemiskinan dunia pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan angka kemiskinan (BPS 2021). Hal ini terjadi karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat. Saat pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagian besar perusahaan terdampak harus memberhentikan operasi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Meningkatnya angka pengangguran ini berdampak negatif pada pendapatan sehingga memengaruhi daya beli masyarakat. Pada akhirnya hal ini akan berujung pada kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang aman dan cukup. Kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhitungan dalam ketahanan pangan. Semakin sulit mengakses pangan secara ekonomi atau fisik, maka ketahanan pangan akan terganggu.

Selain dari kemampuan mengakses pangan, ketahanan pangan juga memperhitungkan aspek ketersediaan pangan. Sektor yang berkaitan dengan ketersediaan pangan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian mampu menjadi andalan dalam pemenuhan pangan rakyat sehingga tidak terjadi kelaparan (Khairad 2020). Pada masa pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang menjadi tumpuan ekonomi (Hermanto 2020). Dalam menghadapi penyebaran Covid-19, sektor pertanian menjadi kebutuhan prioritas karena berhubungan langsung dalam pemenuhan hajat hidup manusia. Semakin banyak jumlah penduduk miskin menjadi dilema bagi dunia pertanian sebagai basis ketahanan pangan karena perlu memerhatikan penyediaan pangan yang murah dan terjangkau bagi penduduk miskin. Ini berakibat harga pangan anjlok, sedangkan di sisi lain harga pangan yang murah tentu merugikan golongan petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai upaya yang tidak merugikan keduanya (Aziza, 2002). Meskipun dianggap sebagai sektor yang mampu bertahan, sektor pertanian tetap terdampak dengan kebijakan PSBB yang menyebabkan turunnya penanganan usaha tani dan hambatan distribusi serta pemasaran produksi yang akhirnya berakibat turunnya gairah bertani. Konsekuensinya adalah penurunan produktivitas yang diikuti oleh penurunan pendapatan dan konsumsi rumah tangga (Tarigan et al. 2020). Perlambatan ekonomi karena pembatasan pergerakan dan distribusi di tengah-tengah masyarakat terbukti telah berdampak pada sektor pertanian (van den Berg et al. 2020). Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki potensi sebagai lumbung pangan nasional untuk ketahanan pangan. Di samping itu, jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 16% dari total di Indonesia, posisi kedua terbanyak setelah DKI Jakarta, dan peningkatan jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 544.000 jiwa (*World Food Programme* 2020). Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami kenaikan, yaitu sekitar 6,82 ribu jiwa. Meningkatnya tingkat kemiskinan mendorong perlambatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga konsumsi rumah tangga menurun karena kemampuan daya beli yang menurun.

Dampak terburuk pandemi dapat menyebabkan akses pangan keluarga miskin semakin terbatas yang dapat mengancam ketahanan pangan (Hasanah et al. 2021). Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 2020, sebagian besar kabupaten di provinsi ini berada pada status sangat tahan (prioritas 6). Ketahanan pangannya sebagian besar berada pada status sangat tahan, tetapi Badan Pusat Statistik masih menyatakan bahwa jumlah penduduknya yang termasuk sangat rawan pangan sekitar 9,33%, yang termasuk rawan pangan 25,86%, dan yang tahan pangan 64,89% (Fauzi et al. 2019). Dapat disimpulkan bahwa status tahan pangan dalam skala provinsi ataupun kota/kabupaten tersebut tidak selalu menjamin tiap individu tergolong tahan. Salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem pada masa Pandemi Covid-19 adalah Kabupaten Pandeglang (Iqbal 2021). Kemiskinan ekstrem ini akan berdampak pada tingkat ketahanan pangan pada aspek keterjangkauan. Ditambah lagi, kabupaten ini merupakan salah satu wilayah dengan kasus tertinggi yang terinfeksi Covid19 di Banten (Pusat Informasi & Koordinasi Covid19). Dengan adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini perlu diketahui bagaimana perubahan yang terjadi pada ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Dampak terhadap ketahanan pangan ini perlu dianalisis dengan melihat bagaimana perubahan ketahanan pangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 sebagai ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan cepat. Gunanya ialah untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dalam memberikan arah dan rekomendasi penyusunan program dan kebijakan khususnya di Kabupaten Pandeglang. Sejalan dengan pendapat Fan et al. (2021), ketahanan pangan baik sebelum, selama, dan setelah Pandemi Covid-19 selalu memerlukan respons segera dari semua pihak karena dimungkinkan adanya efek jangka panjang dan akan ada kejutan peristiwa di masa depan sehingga perlu mengambil pelajaran dengan bijak.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dikaji adalah ketahanan pangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang pada tingkat desa. Kabupaten Pandeglang memiliki 6 wilayah, 35 kecamatan, 339 desa dan kelurahan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (Creswell 2014). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) pada tahun 2018 yang dijadikan sebagai data sebelum Covid-19 dan tahun 2020 yang dijadikan sebagai data selama pandemi. Data tersebut bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Peneliti menggunakan teknik studi kepus takaan dengan mengkaji referensi teori yang relevan dengan ketahanan pangan suatu wilayah. Variabel yang digunakan ialah indikator dalam perhitungan status ketahanan pangan yang terdiri atas 3 aspek. Aspek ketersediaan pangan terdiri atas indikator nisbah luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dan nisbah jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Aspek keterjangkauan pangan terdiri atas indikator nisbah jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai. Aspek pemanfaatan pangan terdiri atas indikator nisbah jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan nisbah jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

**Analisis Data**

Untuk mengetahui perbedaan antara ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan Sistem Pelayanan Minimal ini dilakukan uji t sampel berpasangan dengan alat bantu SPSS pada 6 indikator yang digunakan untuk menghitung ketahanan pangan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Konsep dasar uji tersebut adalah sebagai berikut: (1) apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan; (2) dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama tetapi memiliki dua data yang berbeda yaitu waktu; dan (3) merupakan bagian dari statistik parametrik sehingga kedua data tersebut harus berdistribusi normal. Pada output terakhir, uji ini menujukkan apakah ada perbedaan antara ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang sebelum dan selama pandemi berdasarkan standar pelayanan minimal. Dasar pengambilan keputusan untuk uji ini ialah (1) Jika nilai sig. (2-tailed) 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah itu, dianalisis data deskriptif berupa peta ketahanan pangan (FSVA) untuk dibandingkan dari sebelum dan selama pandemi untuk memberikan deskripsi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Emzir 2010).

Peta FSVA merupakan informasi ketahanan pangan yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (baik dari dalam negeri, cadangan pangan, ataupun impor), keterjangkauan/akses pangan (kemampuan fisik, ekonomi, dan sosial), dan pemanfaatan pangan (penggunaan pangan dengan gizi terpenuhi). Keterangan ini dapat dilihat pada Tabel 1. Metode analisis FSVA yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung diawali dengan penentuan range/cut off point individu menggunakan pendekatan sebaran data empiris pada setiap desa dan dibagi menjadi enam prioritas. Selanjutnya dianalisis komposit dengan pendekatan pembobotan untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Perhitungan analisis komposit melalui standarisasi nilai indikator menggunakan *z-score* dan *distance-to-scale* lalu menjumlahkan hasil perkalian antara setiap nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator. Setelah itu desa dikelompokkan ke dalam enam prioritas berdasarkan *cut off point* komposit yang merupakan hasil penjumlahan dari setiap perkalian antara bobot indikator individu dan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance-to-scale. Hasil perkalian dikelompokkan ke dalam enam prioritas berdasarkan nilai cut off point komposit dan divisualkan ke dalam bentuk peta dengan gradasi warna merah dan hijau. Prioritas 1 (sangat rentan pangan), Prioritas 2 (rentan pangan), Prioritas 3 (cukup rentan pangan), Prioritas 4 (cukup tahan pangan), Prioritas 5 (tahan pangan), dan Prioritas 6 (sangat tahan pangan). Gradasi merah mengindikasikan ragam tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan, sedangkan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan.

Tabel 1. Aspek ketahanan pangan dan indikator penyusunnya

|  |  |
| --- | --- |
| Indikator | Indeks ketahanan pangan |
| Aspek |
| Ketersediaan | Keterjangkauan | Pemanfaatan |
| 12 | Nisbah luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desaNisbah jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga | Nisbah jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desaDesa yang tidak memiliki akses penghubung memadai | Nisbah jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah penduduk desaNisbah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk |

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyediaan informasi mengenai Ketahanan Pangan tertera dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata diperlukan untuk mendukung pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi guna memberikan arah dan rekomendasi penyusunan program dan kebijakan kepada pembuat keputusan.

Peta FSVA menampilkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerawanan pangan. FSVA kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situsasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (baik dari dalam negeri, cadangan pangan, ataupun impor), keterjangkauan/akses pangan (kemampuan fisik, ekonomi dan sosial), dan pemanfaatan pangan (penggunaan pangan dengan gizi terpenuhi).

Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten memiliki karakteristik masing-masing sehingga penentuan indikator nasional atau provinsi berbeda dengan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten pada FSVA memiliki 6 indikator. Dalam aspek ketersediaan, indikator yang digunakan terdiri atas dua indikator, yaitu nisbah luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa, dan nisbah jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Aspek keterjangkauan terdiri atas indikator nisbah jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa dan jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai. Aspek pemanfaatan pangan terdiri atas indikator nisbah jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah penduduk desa, dan nisbah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Laporan FSVA Kabupaten Bandung terbitan tahun 2019 disusun menggunakan data tahun 2018 dan dijadikan sebagai data ketahanan pangan sebelum pandemi. Pada tahun 2020 Kabupaten Pandeglang tidak menerbitkan laporan karena tidak semua wilayah diinstruksikan untuk membuat laporan pada tahun tertentu. Sementara laporan ketahanan pangan pada tahun 2021 menggunakan data tahun 2020 yang digunakan sebagai data ketahanan pangan selama pandemi. Laporan ini bermanfaat untuk menganalisis dan mengevaluasi tren ketahanan pangan di suatu wilayah khususnya saat terjadi suatu fenomena besar yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Seperti diketahui, salah satu fenomena besar yang saat ini terjadi ialah pandemi Covid-19 yang mendisrupsi segala aspek. Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk berkerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam ketahanan pangan menjadi pengaman pemenuhan kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk di tengah kondisi penuh ketidakpastian akibat Covid-19. Meskipun sektor pertanian selama ini dikenal sebagai sektor ekonomi yang paling bertahan dari krisis, beberapa hasil penelitian melaporkan penyebaran Covid-19 menyebabkan terganggunya pasokan pangan dan kenaikan harga pangan di wilayah terdampak (Hermanto 2020).

Salah satu indikator ketahanan pangan yang terkait dengan bidang pertanian ialah nisbah luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa. Pada masa pandemi ini, diberlakukan karantina wilayah berdampak pada distribusi penyaluran saprodi usahatani. Jumlah saprodi yang terbatas di tingkat petani menyebabkan harga tinggi dan ada permainan harga akibat keterbatasan jumlahnya. Pandemi ini berakibat pada menurunnya produksi sebesar 5% (Hermanto 2020). Dampak yang terjadi pada salah satu indikator ketahanan pangan ini akan memengaruhi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Belum lagi dengan indikator lain seperti aspek keterjangkauan dan pemanfaatan.

**Hasil Uji**

Berdasarkan hasil uji, output yang didapat tertera pada Tabel 2. Terjadi penurunan rata-rata ketahanan pangan dari tahun 2018, yaitu 6,3122. Hal ini menggambarkan bahwa saat pandemi Covid-19 salah satu atau beberapa skor individu dari indikator penyusun komposit ketahanan pangan pada desa di Kabupaten Pandeglang menurun. Penurunan tertinggi terdapat pada aspek keterjangkauan, yaitu indikator nisbah jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa. Pernyataan ini berdasarkan adanya peningkatan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa yang memberi nilai negatif pada perhitungan ketahanan pangan. Perbedaan nilai indikator ketahanan pangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 dapat dilihat pada Tabel 3.

Perbedaan yang nyata antara ketahanan pangan sebelum dan selama pandemi didapatkan dari hasil uji sampel berpasangan (Tabel 4). Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 <0,05. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara ketahanan pangan sebelum dan selama pandemi. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini berdampak dan berpengaruh pada ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya, dianalisis perbandingan komposit dan perbandingan setiap indikator penyusunnya. Peta komposit yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang menunjukkan kondisi kerentanan terhadap kerawanan

Tabel 2 Hasil uji statistika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rata-rata | Jumlah | Simpangan baku | Galat baku |
| Pasangan 1 | KP tahun 2020KP tahun 2022 | 71,748265,4360 | 280280 | 6,749475,63031 | 0,403360,33648 |

Tabel 3 Perbedaan nilai indikator ketahanan pangan sebelum dan selama pandemi Covid-19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Indikator** | **Sebelum Pandemi (2018)** | **Selama Pandemi (2020)** | **Keterangan** |
| Ketersediaan | Nisbah luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desaNisbah jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga | 0,30980,0570  | 0,03080,0523 | Tidak dapat dibandingkan karena indikator berbedaMenurun |
| Keterjangkauan | Nisbah jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desaDesa yang tidak memiliki akses penghubung memadai | 0,0980 2 | 0,47851 | MeningkatMenurun  |
| Pemanfaatan | Nisbah jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah penduduk desaNisbah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk | 0,1185 2,1800  | 0,06102,3421 | MenurunMeningkat |

|  |
| --- |
| Tabel.4. Uji Sampel Berpasangan |
|  | Selisih pangan | t | Df | Sig (2- tailed) |
| Rata-rata | Simpangan baku | Galat Baku | Selang kepercayaan 95% atas selisih |
| bawah | Atas |
| Pair 1  | KP2020−2022  | 6,31218  | 7,79252 | 0,46569 | 5,39546 | 7,22890 | 13,554 | 279 | 0,000 |

pangan sampai tingkat desa dengan 6 prioritas. Wilayah yang berada pada prioritas 1 tidak mengartikan semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, begitupun dengan desa prioritas 6 tidak mengartikan semua penduduknya tahan pangan.

**Indeks Komposit Katahanan Pangan**

Berdasarkan laporan ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2021 (menggunakan data tahun 2020), nilai rata-rata komposit ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang adalah 71,7482 sedangkan pada tahun 2022 adalah 65.4360. Menurut Amare *et al.* (2021) peningkatan status kerawanan pangan dapat terjadi akibat perubahan yang terjadi saat pandemi, terutama karena pembatasan ruang gerak masyarakat. Saat pemerintah membuat kebijakan PSBB, sebagian besar perusahaan terdampak harus memberhentikan operasi yang menyebabkan PHK secara masal. PHK i diberlakukan akibat dari menurunnya tingkat produksi karena rendahnya tingkat permintaan barang dan jasa. Penduduk usia kerja yang menganggur akibat pandemi sebanyak 1,62 juta orang, BAK (Bukan Angkatan kerja) sejumlah 0,65 juta, 1,11 juta kehilangan pekerjaan sementara, dan 15,72 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja (Fikri 2021). Meningkatnya angka pengangguran ini berdampak negatif pada pendapatan sehingga memengaruh daya beli. Secara agregat, nilai rata-rata komposit tahun 2020 dan 2022 menurun 6,3122. Perbandingan persentase jumlah desa dan prioritasnya pada tahun 2020 dan 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.

Meskipun secara agregat nilai rata- rata komposit ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang menurun, jumlah desa dengan kategori prioritas 1 sampai 3 (sangat rentan – cukup rentan) menurun juga pada tahun 2022, yaitu 1,75% atau 5 desa. Sementara itu,

persentase desa pada prioritas 4 sampai 6 (cukup tahan– sangat tahan) meningkat 1,76% atau 5 desa. Jika dilihat perubahan antara persentase prioritas 1−3 dan prioritas 4−6, pada tahun 2020 atau saat Pandemi Covid-19, di Kabupaten Pandeglang lebih banyak desa yang memasuki prioritas cukup tahan hingga sangat tahan dibandingkan pada tahun 2018. Data ini dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3. Penurunan indeks ketahanan pangan justru menambah jumlah desa yang masuk ke dalam katergori tahan pangan. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan saat Pandemi Covid-19 bersifat transien dan serentak terjadi pada sebagian besar masyarakat sehingga sebaran data dalam perhitungan skor aspek keterjangkauan pangan tidak begitu tinggi.

Berdasarkan laporan ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang, Desa Cigorondong (Kecamatan Sumur) dan Desa Tugu (Kecamatan Cimanggu) pada tahun 2020 berada pada prioritas 1. Pada tahun 2022, Desa Cigorondong masih berada pada prioritas 1 sedangkan Desa Tugu berada pada prioritas 4. Pada Prioritas 2, di antara kedua tahun tersebut tidak terdapat desa yang sama tetapi terdapat kesamaan di kecamatan, yaitu Kecamatan Cimanggu. Perubahan Hasil Komposit Desa di Kabupaten Pandeglang pada prioritas 1 dan 2 tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 5. Perubahan komposit ketahanan pangan secara spasial dapat terlihat pada peta tahun 2020 bagian selatan Kabupaten Pandeglang yang asalnya termasuk kategori rentan ditunjukkan dengan merah muda berubah menjadi hijau muda pada tahun 2022. Hal ini

menunjukkan ada peningkatan nilai nisbah dari salah satu atau beberapa indikator ketahanan pangan di wilayah selatan kabupaten ini.

Menurut laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 secara umum disebabkan oleh rendahnya ketersediaan lahan pertanian, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia pangan, tingginya jumlah penduduk prasejahtera, dan rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan. Sejalan dengan penelitian Zamrodah (2020), ketahanan pangan Kecamatan Bantaran lebih besar dipengaruhi oleh nisbah luas baku lahan sawah yang agak rentan, penyedia sarana prasarana pangan yang masih kurang, dan rumah tangga miskin yang sangat rentan. Terlebih saat masa pandemi terdapat banyak disrupsi dalam segala aspek, begitupun dengan indikator ketahanan pangan, salah satunya ialah aspek ekonomi masyarakat. Rata-rata perubahan indikator yang paling besar ialah indikator nisbah tingkat penduduk dengan kesejahteraan rendah, yaitu 0.3805. Hal ini disebabkan oleh pembatasan gerak masyarakat untuk meredam penyebaran virus Covid- 19 sehingga banyak terjadi pengangguran seketika. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Pandeglang ialah mempromosikan produksi pertanian dungan bagi petani. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung pada tahun 2019 naik sekitar 0,16% dari tahun 2018 yang menyumbangkan kontribusi sebesar 7,84% sehingga berpeluang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan Dharmalingam *et al.* (2021), pada saat darurat sekor pertanian menjadi sektor andalan bagi negara berkembang untuk menjaga ketahanan pangan.

Pemerintah India telah melakukan berbagai peningkatan menufaktur sektor pertanian. Strategi lain pada masa Pandemi Covid-19 ini dengan mempromosikan *short food supply chains* (SFSC) untuk mempertahankan ketersediaan rantai pasokan makanan lokal yang meminimumkan biaya transportasi dan durasi waktu untuk pengiriman makanan olahan untuk mengurangi kelaparan dan kemiskinan.

**Indikator Nisbah Luas Baku Lahan Pertanian Terhadap Wilayah Desa**

Pada 2018, indikator dalam aspek ketersediaan yang digunakan adalah nisbah luas baku lahan sawah terhadap wilayah desa, tetapi pada 2020 indikator tersebut diganti dengan nisbah luas baku lahan pertanian terhadap wilayah desa. Hal ini dikarenakan terdapat lahan pertanian lain yang dapat menghasilkan bahan pangan dan pendapatan seperti perkebunan palawija atau hortikultura. Dalam penelitian ini, meskipun data indikator dalam aspek ketersediaan yang digunakan berbeda tetapi perlu juga diketahui bagaimana perbedaan penggunaan indikator ketersediaan ini berkontribusi pada komposit ketahanan pangan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020, ratarata indikator nisbah lahan pertanian di kabupaten ini adalah 0,0308, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata indikator nisbah lahan sawah adalah 0,3098, yang berarti mengalami penuruanan. Pada Gambar 4 dapat dilihat perubahan secara spasial bahwa saat indikator.

Tabel 5 Perubahan hasil komposit Desa di Kabupaten Pandeglang pada Prioritas 1 dan 2 tahun 2020 dan 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun 2020 | Tahun 2022 |
| Kategori | Kecamatan | Desa | Kategori | Kecamatan | Desa |
| Prioritas 1 | SumurCimangguCibitung | CigorondongTuguCibitung | Prioritas 1 | SumurCimangguCibitung | CigorondongTuguCibitung |
| Prioritas 2 |  |  | Prioritas 2 |  | Tunggal Jaya |

ketersediaan yang digunakan adalah nisbah lahan sawah, sebaran warna merah di peta lebih banyak dan terdapat di bagian selatan karena karakteristik topografinya merupakan perbukitan dan lebih banyak sektor perkebunan. Adapun saat nisbah lahan pertanian yang dijadikan indikator, sebaran warna merah lebih banyak terdapat di daerah utara karena merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kota Pandeglang yang karakteristiknya lebih padat penduduk. Jumlah desa di setiap prioritas 1‒6 dalam indikator nisbah luas lahan sawah/pertanian terhadap luas wilayah desa pada tahun 2018 dan 2020 masih sama, yaitu Priotitas 1, Prioritas 2.

Meskipun persentase prioritas pada indikator nisbah lahan di tahun 2020 dan 2022 sama, secara spasial dapat terlihat perbedaannya. Setelah indikator diubah menjadi nisbah lahan pertanian, sebaran warna hijau di peta lebih banyak daripada sebelumnya. Perubahan indikator menjadi lahan pertanian karena Kabupaten Pandeglang memiliki hasil komoditas pertanian yang melimpah baik itu hortikultura perkebunan, tanaman hias, dll. Pada tahun 2021, produksi tanaman sayuran meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 8.225,316 ton dengan jamur menjadi komoditas dengan produksi terbesar mencapai 1.138,311 ton. Sementara lima komoditas utama lainnya adalah kubis dengan produksi 978,13 ton, kentang 816,543 ton, petsai/sawi 789,066 ton, bawang merah 621,001ton, dan labu siam 551,744 ton. Produk pertanian unggulan lainnya adalah sektor perkebunan, terutama komoditas teh dan kopi. Dua komoditas ini merupakan salah satu produk ekspor unggulan, baik ekspor antarwilayah maupun ekspor.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, yakni nilai sig. (2-*tailed*) sebesar 0,000 <0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penurunan rata-rata ketahanan pangan sebelum dan selama pandemi ialah 6,3122 dengan perbedaan tertinggi terjadi pada indikator jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah yang meningkat sebesar 0,3805. Hal ini disebabkan oleh aspek keterjangkauan masyarakat terhadap pangan akibat pembatasan gerak masyarakat untuk sehingga banyak terjadi pengangguran seketika. Respons yang segera untuk menangani ketahanan pangan diperlukan untuk menghindari kerawanan pangan. Salah satu langkah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang di tengah kondisi Pandemi Covid-19 untuk mempertahankan ketahanan pangan ialah menggencarkan produksi pertanian dengan mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani sehingga memberikan peluang yang nyata untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam situasi kritis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aziza TN. 2002. *Kompleksitas penanganan penguatan ketahanan pangan*.

Amare M, Abay KA, Tiberti L, Chamberlin J. 2021. COVID-19 and food security: Panel data evidence from Nigeria. *Food Policy*. 101(May): 102099. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102099

Béné C, Bakker D, Chavarro MJ, Even B, Melo J, Sonneveld A. 2021. Global assessment of the impacts of COVID-19 on food security. *Global Food Security*. 31(Desember): 100575 https://doi.org/ 10.1016/j.gfs. 2021.100575

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. *Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0)*. Jakarta (ID).

Creswell JW. 2014. Research Design: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran. Pustaka Pelajar.

Dharmalingam B, Giri N, Thulasiraman MS, Kothakota VA, Rajkumar. 2021. Short food supply chains to resolve food scarcity during COVID-19 pandemic. An Indian model. *In Advances in Food Security and Sustainability.* 6(21): 36-63. https://doi.org/ 10.1016/bs.af2s.2021.08.001

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta (ID): Rajawali Press.

Fan S, Teng P, Chew P, Smith G, Copeland L. 2021. Food system resilience and COVID-19 – Lessons from the Asian experience. *Global Food Security*. 28(Maret): 100501.

https://doi.org/10.1016/